



RENCANA KERJA DISDUKCAPIL | TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PASURUAN

KATA PENGANTAR

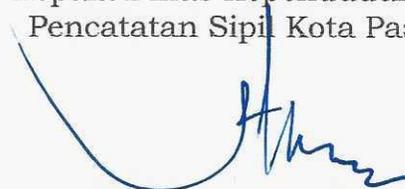
Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah swt, karena atas kuasa, rahmat serta bimbingan-Nya, kami dapat menyusun “Rencana Kerja” Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 dimaksud sebagai tindak lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2024 dan sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan tahun 2024. Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai alat kendali dalam menilai kualitas kinerja kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan dan berperan sebagai alat pendorong untuk mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun. Program kegiatan didalam Rencana Kerja tahun 2024 harus berpedoman pada program kegiatan yang sudah ada pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Akhirnya kami berharap semoga “Rencana Kerja” Tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Pasuruan, 17 Juli 2023

Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Pasuruan



SITI MARIYAM, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670316 198903 2 012

DAFTAR ISI

	Halaman
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	38
2.4. Review terhadap Rancangan RKPD	40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 55	
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	56
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	56
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	59

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS	
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	61
BAB V : PENUTUP	77
5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	77
5.2. Kaidah-Kaidah pelaksanaan	77
5.3. Rencana Tindak Lanjut	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan	11
Tabel 2.2. Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan	12
Tabel 2.3. Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.....	14
Tabel 2.4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	16
Tabel 2.5. Target dan capaian indikator kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan	37
Tabel 2.6. Review terhadap RKPD Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan	41
Tabel 2.7. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	55
Tabel 3.1. Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional dan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2024	59
Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	60
Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	67

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja juga menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah yang terkait program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tahun 2024 memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan rencana kerja, mempertimbangkan sinergi antar sektor, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh perangkat daerah serta berbagai pihak terkait.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja.

Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Pasal 175 Ayat (1) dalam Permendagri 86/2017 Renja PD disusun berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjaditanggung jawab PD.

Tata cara penyusunan Renja PD sebagaimana Permendagri 86/2017 adalah sebagai berikut :

a) Persiapan Penyusunan Renja.

- Pembentukan Tim Penyusun Renja PD.
- Orientasi mengenai Renja.
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja PD.
- Penyiapan Data dan Informasi.

b) Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

c) Penyusunan Rancangan Renja PD

- Penyusunan rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD.
- Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/ lintas PD.

- Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.

d) Perumusan Rancangan Akhir Renja PD

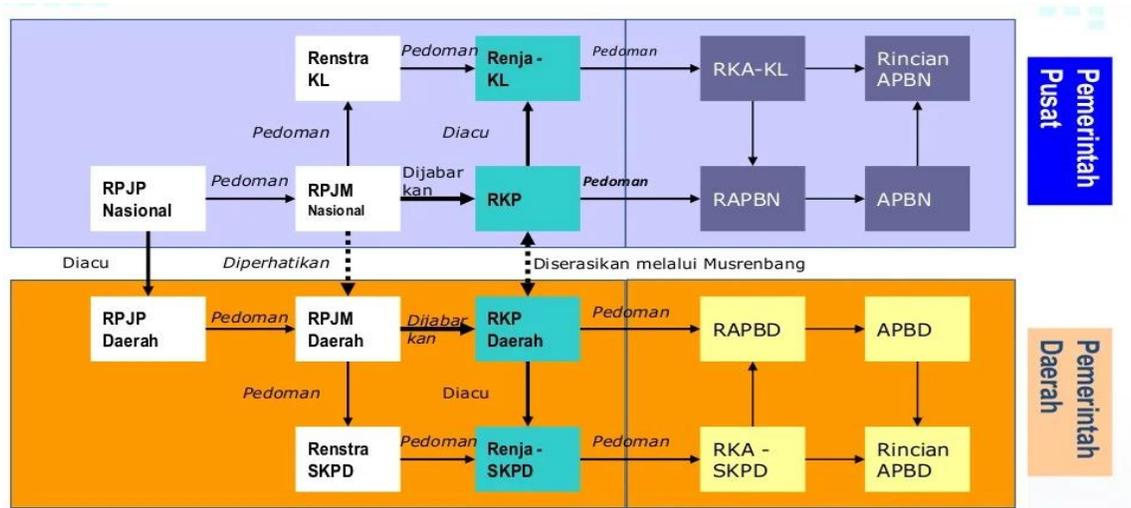
Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perwali tentang RKPD.

e) Penetapan Renja PD

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1



Gambar 1.1. Bagan Alur Hubungan Perencanaan

Dari bagan alur dapat dijelaskan Renja perangkat daerah berpedoman pada Renstra perangkat daerah periode 5 (lima) tahun, Renstra berpedoman pada RPJM Daerah yang berpedoman pada RPJP Daerah yang mengacu RPJP Nasional. RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional yang berpedoman pada RPJP Nasional. Renja perangkat daerah diserasikan dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja provinsi dengan urusan terkait.

Rencana Kerja tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan bersinergi dengan prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2024 yaitu “Digitalisasi pelayanan publik mendukung aktivitas masyarakat”, prioritas strategis pembangunan pemerintah pusat yaitu “Transformasi digital”, prioritas kinerja Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tahun 2024 yaitu “Digitalisasi adminduk untuk pelayanan publik dan pemilu tahun 2024”, prioritas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 yaitu “Peningkatan pemanfaatan data kependudukan dan implementasi Identitas Kependudukan Digital”.

Dalam mendukung prioritas pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan melakukan kerjasama dengan lembaga/perangkat daerah dalam pemanfaatan data kependudukan, integrasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan layanan instansi terkait, pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil digital, serta penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi wajib KTP.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahun 2024 ini berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan yang memayungi perencanaan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.
7. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2024.

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Maksud penyusunan Renja tahun 2024 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis perangkat daerah jangka pendek (1 tahun).
2. Menyelaraskan rencana strategis Kota Pasuruan dengan pelayanan perangkat daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis perangkat daerah.
3. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Tujuan penyusunan Renja tahun 2024 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 1 tahun.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran PD.
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan.
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib melaluicapaian target kinerja program.
5. Memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Tahun 2023 s.d. Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Dinas sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2022 dan tahun berjalan 2023 serta perkiraan target anggaran tahun 2024.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja tahun 2022 telah dilaksanakan, dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pendaftaran Penduduk
- 2.1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
 - Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
 - Sub Kegiatan Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
 - Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
- 2.2. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
- Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
 - Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
3. Program Pencatatan Sipil
- 3.1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
- Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja Output			Anggaran (Rp.)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terpenuhi	19	19	100%	114.005.500	109.600.000	96,14%
2	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terlayani	4	4	100%	310.210.064	293.500.200	94,61%
3	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penataan pendaftaran penduduk yang tersedia	3	3	100%	79.966.400	79.019.200	98,82%
4	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	3	3	100%	105.484.800	83.725.700	79,37%
5	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	99,89%	99,89%	100%	320.833.705	312.363.205	97,36%
6	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	150	150	100%	47.779.495	45.779.495	95,81%
7	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah sistem database kependudukan berbasis SIAK yang terkelola	1	1	100%	341.119.130	269.379.258	78,97%

Faktor pendorong realisasi program/kegiatan sehingga memenuhi target kinerja hasil/keluaran yaitu :

1. Pengadaan barang dapat tercapai dengan baik karena spesifikasi barang yang dibutuhkan dapat dipenuhi oleh penyedia barang.
 2. Pelayanan pendaftaran penduduk dapat terlayani dengan baik karena blanko dokumen kependudukan tersedia, peralatan penerbitan dokumen dalam kondisi baik, dan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat jarang mengalami gangguan.
 3. Penataan pendaftaran penduduk dapat terlaksana dengan baik karena peralatan scanner dalam kondisi baik dan lancar.
 4. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dapat terlaksana karena unit layanan lain yang terintegrasikan juga melakukan layanan dengan baik dan cepat.
 5. Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran dapat tercapai sesuai target yang ditentukan karena adanya penjangkauan kepada warga yang belum mempunyai akta kelahiran berdasarkan data penduduk yang terdapat pada database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
 6. Sosialisasi pencatatan sipil dapat terlaksana dengan baik karena peserta antusias dalam mengikuti acara sosialisasi di kelurahan.
 7. Sistem database kependudukan berbasis SIAK terkelola dengan baik karena peralatan dan jaringan SIAK dilakukan pemeliharaan secara berkala.
- C. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Program Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

Tabel 2.3
 Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 Yang Melebihi
 Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja Output			Anggaran (Rp.)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90%	100%	111,11%	5.202.254.821	4.888.576.835	93,97%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90%	100%	111,11%	86.062.370	73.893.560	85,86%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90%	100%	111,11%	3.472.321.389	3.417.400.662	98,42%
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	90%	100%	111,11%	60.603.180	49.833.180	82,23%
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	90%	100%	111,11%	109.763.200	80.053.200	72,93%
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90%	100%	111,11%	282.207.514	274.531.117	97,28%
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90%	100%	111,11%	744.798.800	641.638.755	86,15%
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	90%	100%	111,11%	332.492.868	241.626.361	72,67%
B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	98%	98,14%	100,14%	495.661.264	456.245.100	92,05%
		Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA	93%	95,26%	102,43%			
C	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	96,60 %	97,72%	101,16%	320.833.705	312.363.205	97,36%

8	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian yang diterbitkan	5100	8089	158,61%	273.054.210	266.583.710	97,63%
D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	29%	32,35%	111,55%	341.119.130	269.379.258	78,97%

Faktor pendorong realisasi program/kegiatan sehingga melebihi target kinerja hasil/keluaran yaitu :

1. Kebutuhan penunjang pemerintahan terfasilitasi dengan baik karena semua kegiatan penunjang pemerintahan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.
2. Persentase penduduk ber KTP elektronik melebihi target yang ditentukan karena adanya sosialisasi pendaftaran penduduk di kelurahan dilanjutkan dengan penjangkauan kepada warga yang belum perakaman atau mempunyai KTP elektronik.
3. Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA melebihi target yang ditentukan karena adanya penjangkauan kepada siswa di sekolah yang belum mempunyai KIA.
4. Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan melebihi target yang ditentukan karena adanya sosialisasi pencatatan sipil akan pentingnya dokumen akta nikah / akta perkawinan sebagai dokumen sah yang diakui oleh negara.
5. Jumlah akta kelahiran dan kematian yang diterbitkan melebihi target yang ditentukan karena adanya sosialisasi pencatatan sipil akan pentingnya akta kelahiran dan kematian serta adanya kerjasama layanan dengan lembaga/instansi lain tentang adanya informasi kelahiran dan kematian warga.
6. Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/Lembaga melebihi target yang ditentukan karena adanya sosialisasi tentang pemanfaatan data kependudukan dan ditindaklanjuti dengan adanya kerjasama pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/Lembaga lain.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Triwulan I Tahun 2023 tercantum dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Pasuruan

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PDs/d Tahun Berjalan				
			Target	Satuan		Target Renja PD(n-2) (2022)	Realisasi Renja PD (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) s.d Juni 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2	12													
2	12	01				90%	%		90%	100%	111,11%	90%	95%	105,56%

2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90%	%		90%	100%	111,11%	90%	95%	105,56%
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	60	dokumen		12	12	100%		12	40%
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	32	dokumen					8	8	25%
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	10	dokumen		2	2	100%		2	40%
						Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	8	dokumen					2	2	25%
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	10	dokumen		2	2	100%		2	40%
						Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	8	dokumen					2	2	25%

2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	35	laporan		7	7	100%		7	40%
						Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24	laporan					6	6	25%
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah responden survei kepuasan masyarakat	2.000	responden		400	400	100%		400	40%
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	laporan					1	1	25%
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90%	%		90%	100%	111,11%	90%	95%	105,56%
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitas gaji dan tunjangannya	70	bulan		14	14	100%		14	40%
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25	orang / bulan					25	25	100%

2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	25	dokumen		5	5	100%		5	40%
						Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	40	laporan					10	10	25%
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	90%	%		90%	100%	111,11%	90%	95%	105,56%
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen barang yang disusun	30	dokumen		6	6	100%		6	40%
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	8	laporan					2	2	25%
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yangmaningkat kompetensinya	90%	%		90%	100%	111,11%		100%	111,11%

					Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	90%	%					90%	90%	100%	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	220	paket				55	55	25%	
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta pembinaan rohani aparatur	285	orang		57		0%	-	0%	
						Jumlah peserta sosialisasi	1.200	orang		300	300	100%	300	50%	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90%	%		90%	100%	111,11%	90%	60%	66,67%
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13	jenis		13	13	100%		13	100%
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13	paket					13	13	100%
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan jasa barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2	jenis		2	2	100%		2	100%

					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	paket					2	2	100%	
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1	jenis		1	1	100%		1	100%
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	dokumen					1	1	100%
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman pelayanan yang tersedia	4	jenis		4	4	100%		4	100%
						Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	320	kotak		80	80	100%		80	50%
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	8	laporan					2	2	25%
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	320	kali		64	64	100%		64	40%
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	260	laporan					65	65	25%

2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	90	%		90	100	111,11%		100	222,22%
						Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terpenuhi	70	unit					16	16	22,86%
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	75	unit		15	15			15	40%
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	64	unit					16	16	25%
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90%	%		90%	100%	111,11%	90%	95%	105,56%
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	2.000	lembar		400	400	100%		400	40%
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	laporan					1	1	25%
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	60	bulan		12	12	100%		12	40%

					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan					3	3	25%
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	orang		1	1	100%		1	100%
					Jumlah jenis alat komputer yang tersedia	7	jenis		7	7	100%		7	100%
					Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	52	jenis		52	52	100%		52	100%
					Jumlah jenis kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	11	jenis		11	11	100%		11	100%
					Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	2	orang		2	2	100%		2	100%
					Jumlah tenaga operator kegiatan pelayanan	21	orang		21	21	100%		21	100%
					Jumlah tenaga Pendukung perkantoran yang tersedia	2	orang		2	2	100%		2	100%
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	8	laporan					2	2	25%

2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	90%	%		90%	100%	111,11%	90%	95%	105,56%
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah perawatan kendaraan bermotor yang tersedia	18	unit		18	18	100%		18	100%
						Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang tersedia	18	unit		18	18	100%		18	100%
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18	unit					18	18	100%
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki	71	unit		71	71	100%		71	100%
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40	unit					40	40	100%

2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang diperbaiki	449	m2		449	449	100%		449	100%
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	unit					1	1	100%
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk ber- KTP Elektronik	99,90 %	%		98%	98,14%	100,14%	98,50%	98,32%	98,42%
						Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA	97%	%		93%	95,26%	102,43%	94%	94,63%	97,56%
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pendaftaran penduduk yang terlayani	6	jenis layanan		6	6	100%		6	100%
						Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terlayani	4	jenis					4	4	100%
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah kelurahan yang diverifikasi data penduduk yang belum rekam	34	kelurahan		34	34	100%		34	100%
						Jumlah laporan penerbitan NIK	60	laporan		12	12	100%		12	40%

					Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kualitas tertib administrasi kependudukan	1.500	orang		300	300	100%		300	40%	
					Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	4.000	dokumen					1.000	1.000	25%	
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah KK yang diterbitkan	75.000	dokumen		15.000	20.229	135%		20.229	53,94%
					Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	60.000	dokumen					15.000	15.000	25%	
2	12	02	2.01	06	Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah SKPWNI yang diterbitkan	7.500	SKPWNI		1.500	2.134	142%		2.134	56,91%
					Jumlah laporan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	48	laporan					12	12	25%	

2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah KIA yang diterbitkan	25.000	KIA		5.000	8.405	168%		8.405	67,24%
						Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan	100.000	eKTP		20.000	19.208	96%		19.208	38,42%
						Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	48	laporan					12	12	25%
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang tertata	75.000	KK		15.000	20.229	134,86%		20.229	26,97%
						Jumlah penataan pendaftaran penduduk yang tersedia	3	jenis					3	3	100%
2	12	02	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah arsip yang tersusun	75.000	dokumen		15.000	20.229	135%		20.229	53,94%

					Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pendaftaran penduduk yang disusun	60.000	dokumen					15.000	15.000	25%
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	30	dokumen		6	6	100%		6	40%
					Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	24	dokumen					6	6	25%

2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah instansi yang terintegrasi pada penyelenggaraan pendaftaran penduduk	3	instansi		3	3	100%		3	100%
						Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	3	jenis					3	3	100,0%
	12	02	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah pengiriman dokumen kependudukan via kurir	12.500	dokumen		2500	2500	100%		2.500	40%
						Jumlah titik pelayanan kependudukan yang terintegrasi dengan pencatatan nikah	20	titik layanan		4	4	100%		4	40%
						Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	3.000	dokumen					1000	1.000	33,33%

2	12	02	2.03	03	Fasilitasi pendaftaran penduduk	Jumlah tersedianya layanan Dukcapil di kelurahan, kecamatan, dan Disdukcapil	39	tempat layana n		39	39	100%		39	200%
						Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	48	laporan					12	12	25%
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	99,90 %	%		99,89%	99,89%	100%	99,90%	99,90%	99,99%
						Persentase penduduk status kawinber-akta perkawinan	96,80 %	%		96,60%	97,72%	101,16%	96,65%	97,19%	100,40%
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta kelahiran dan kematian yang diterbitkan	16.500	akta		4.600	8.089	175,85%	4.600	1.024	6,21%
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan di layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.000	akta		1.000	1.000	100%		1.000	40%
						Jumlah akta kematian yang diterbitkan di layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.000	akta		1.000	1.000	100%		1.000	40%
						Jumlah dokumen pencatatan sipilyang dikirimkan melalui kurir	23.000	akta		4.600	4.600	100%		4.600	40%

					Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	18.400	dokumen					4.600	4.600	25%
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta kelahiran anak usia 0 s.d. 60 hari yang diterbitkan dilayanan persalinan	5.000	akta		1.000	1.000	100%	1.000	40%
					Jumlah akta kelahiran anak usia 0 s.d. 18 tahun yang diterbitkan dilayanan SEHAT	500	akta		100	100	100%		100	40%
					Jumlah akta kelahiran anak usia diatas 18 tahun yang diterbitkan dilayanan mobile	5.000	akta		1.000	1.000	100%		1.000	40%
					Jumlah akta kematian terintegrasi yang diterbitkan	5.000	akta		500	500	100%		500	20%
					Jumlah peserta sosialisasi peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	2.270	akta		454	454	100%		454	40%
					Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	24	layanan					6	6	25%

2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah formulir pengajuan pelayanan pencatatan sipil yang disediakan	70	paket		14	14	100%		14	40%
						Jumlah roll banner persyaratan pencatatan sipil yang didistribusikan	315	unit		63	63	100%		63	40%
						Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	4	paket					1	1	25%
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pencatatan perubahan nama, status anak dan pewarganegaraan yang diterbitkan	1.750	akta		350	350	100%		350	20%
						Jumlah peserta sosialisasi terkait pencatatan sipil	450	orang					100	100	22,22%

2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah pencatatan perceraian yang diterbitkan	75	akta		1	1	100%		1	2,67%
						Jumlah pencatatan perkawinan yang diterbitkan	75	akta		15	15	100%		15	40%
						Jumlah pencatatan, perubahan status anak dan pewarganegaraan yang diterbitkan	1.750	akta		350	350	100%		350	40%
						Jumlah peserta rapat koordinasi pencatatan sipil	245	akta		49	49	100%		49	40%
						Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	32	laporan					8	8	25%
2	12	03	2.02	11	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah buku laporan penerbitan dokumen pencatatan sipil	30	laporan		6	6	100%		6	40%

					Jumlah dokumen pencatatan sipil yang digitalisasi	130.000	dokumen		26.000	26.000	100%		26.000	40%	
					Jumlah laporan penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan terkait pencatatan sipil	24	laporan					6	6	25%	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/ lembaga	52%	%		29%	32%	110,34%	35%	33,50%	64,42%
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah database kependudukan berbasis SIAK yang terkelola	1	aplikasi		1	1	100%	1	1	100%
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah buku laporan agregat kependudukan yang tersusun	500	dokumen		100	100	100%		100	40%
						Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dipelihara	1	unit		1	1	100%		1	100%
						Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	264	dokumen					66	66	25%

2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah kerjasama dengan layanan yang terintegrasi	31	PKS		31	31	100%		31	100%
						Jumlah peserta forum komunikasi publik	600	orang		120	120	100%		120	40%
						Jumlah peserta sosialisasi pemutakhiran data kependudukan	1.060	orang		212	212	100%		212	40%
						Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	16	dokumen					4	4	25%
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah mitra yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	40	Mitra					2	1	2,50%
	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	8	laporan					2	2	25%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan merupakan indikator dari sasaran, program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Indikator pada urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mengacu pada target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga terdapat dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penilaian capaian IKK dilakukan berdasarkan bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan. Urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan 4 (empat) IKK output yaitu penerbitan akta perkawinan, penerbitan akta perceraian, penerbitan akta kematian dan penyajian data kependudukan. IKK outcome berjumlah 4 (empat) terdiri dari Perekaman KTP elektronik, Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA, kepemilikan akta kelahiran, jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak termasuk dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketetapan sasaran. Substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan yang ditetapkan sebagai SPM adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial.

Target dan capaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Target dan capaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (Sesuai RPJMD 2021-2026)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	-	√	98%	98,50%	99%	99,50%	98,14%	98,14 %	99%	99,50 %	
2	Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA	-	√	93%	94%	95%	96%	95,26%	95,26 %	95%	96%	
3	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	-	√	99,89%	99,90%	99,90%	99,90%	99,89%	99,89 %	99,90 %	99,90 %	
4	Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	-	√	96,60%	96,65%	96,70%	96,75%	97,72%	97,72 %	96,70 %	96,75 %	
5	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	-	√	29%	35%	41%	47%	32%	32%	41%	47%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja selain melakukan evaluasi capaian program, juga memperhatikan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Hal ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Perwujudan Kota Pasuruan sebagai layanan satu pintu sehari pasti jadi.
2. Penerapan konsep smart city yang terpadu sebagai implementasi satu data Kota Pasuruan
3. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap hadirnya pemerintah

Dalam menyelesaikan isu-isu strategis tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan melakukan upaya dalam aksi kegiatan sebagai berikut :

1. Telah dilakukan layanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehari langsung jadi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pasuruan.
2. Telah dilakukan kerjasama pemanfaatan data dengan perangkat daerah/lembaga lain dalam mendukung Smart City.
3. Telah dilakukan aksi jemput bola layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada warga dan tempat strategis lainnya dalam memudahkan layanan yang membahagiakan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu kurangnya pemahaman sebagian kecil warga tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sosialisasi di kelurahan dan penjangkauan layanan kepada warga melalui layanan jemput bola di kelurahan, sekolah, dan tempat umum.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung program prioritas Kota Pasuruan adalah:

1. Masih sedikitnya layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi dengan perangkat daerah/lembaga lain.
2. Masih sedikitnya perangkat daerah/lembaga lain yang memanfaatkan data kependudukan.
3. Masih adanya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lebih dari satu hari.

Untuk menghadapi tantangan tersebut perlu diupayakan pengembangan inovasi pelayanan yang berkelanjutan untuk membangun pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, mudah, inovatif dan memuaskan masyarakat. Keberhasilan suatu pelayanan sangat tergantung dengan kemampuan untuk berinovasi secara terus menerus.

Inovasi adalah satu-satunya jalan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inovasi dihasilkan dari kreativitas yang merupakan pola pikir dalam bekerja dengan hal-hal baru. Inovasi yang terus menerus memerlukan kontribusi dari setiap individu dan perangkat daerah yang fokus pada pencapaian terbaik. Setiap individu harus membiasakan pola pikir kreatif untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik.

Selain inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, peluang yang harus dilakukan dalam mendukung program prioritas Kota Pasuruan adalah:

1. Melakukan komunikasi dan kerjasama layanan perangkat daerah/ lembaga lain dengan layanan kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Melakukan komunikasi dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan perangkat daerah/ lembaga lain.

3. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehari jadi.
4. Pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan layanan ojek online / kantor pos.

2.4. Review terhadap RKPD

Rencana pembangunan daerah dapat dilihat dari cita-cita kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Cita – cita tersebut dapat dituangkan ke dalam visi yang kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai cara untuk mewujudkan visi tersebut. Visi Kota Pasuruan periode tahun 2021-2026 yaitu:

PASURUAN KOTA MADINAH

“Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmoni Warganya”

Berdasarkan visi Kota Pasuruan tersebut maka tema Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2024 yaitu “Aktivasi Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar, dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sosial”, sebagaimana tertuang dalam Tematik dan Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan tahun 2024 yaitu “Digitalisasi Pelayanan Publik Mendukung Aktivitas Masyarakat”, dengan prioritas pembangunan yang berhubungan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi :

1. Kemudahan layanan satu pintu sehari pasti jadi
2. Layanan yang terintegrasi
3. Pemanfaatan data kependudukan

Atas dasar prioritas pembangunan tersebut dan adanya reformasi sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara nasional, maka rancangan awal program dan kegiatan akan mengakomodasi dinamika yang berkembang, sehingga diperlukan perbaikan dan penambahan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, maka ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan signifikan dari komposisi anggaran. Dan selanjutnya kami sajikan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Table 2.6.
 Reviu terhadap RKPD Tahun 2024
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kota Pasuruan

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.230.717.324	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.729.984.100	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				7.230.717.324	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.729.984.100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90 %	5.838.088.460	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90 %	5.605.674.783	

1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90 %	110.147.950	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90 %	105.347.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	16.174.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	14.574.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	11.652.410	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.052.400	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	11.447.150	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	11.447.100	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	13.144.890	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	11.544.500
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	57.729.100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	57.729.100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90 %	4.264.858.803	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90 %	3.870.307.300
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	4.203.254.403	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.821.484.100

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10 Laporan	61.604.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10 Laporan	48.823.200	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun tepat waktu	90 %	68.476.980	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun tepat waktu	90 %	57.590.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	68.476.980	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	57.590.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	90 %	36.390.640	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	90 %	36.352.800	

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	36.390.640	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	36.352.800	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90 %	195.345.480	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90 %	319.675.900	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13.712.820	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13.688.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21.850.180	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21.837.400	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.872.880	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.102.400	

	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	9.270.800	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	9.228.100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	146.638.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91 Laporan	269.820.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	8 unit	96.743.860	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	25 Unit	192.574.566	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	96.743.860	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	192.574.566	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90 %	806.733.730	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90 %	778.491.180	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.200.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	160.575.580	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	160.575.580	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	643.958.150	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	615.715.600	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	90 %	259.391.017	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	90 %	245.335.537	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	170.968.617	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	157.066.639	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	49.830.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	49.781.802	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	38.592.400	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	38.487.096	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kota Pasuruan	Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA Persentase penduduk ber-KTPElektronik	95 % 99 %	673.277.682	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kota Pasuruan	Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA Persentase penduduk ber-KTPElektronik	95 % 99 %	689.386.920	
9	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terlayani	4 jenis	364.991.264	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terlayani	4 jenis	402.722.840	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1000 Dokumen	52.955.584	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1000 Dokumen	81.118.240	

	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	15000 Dokumen	17.770.962	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	15000 Dokumen	28.823.000	
	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan	15.896.078	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0 Laporan	-	
	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan	278.368.640	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan	292.781.600	
10	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah penataan pendaftaran penduduk yang tersedia	3 jenis	105.548.718	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah penataan pendaftaran penduduk yang tersedia	3 jenis	136.853.680	

	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	15000 Dokumen	29.646.408	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	15000 Dokumen	25.524.580	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain BlangkoKTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	6 Dokumen	75.902.310	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain BlangkoKTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	6 Dokumen	111.329.100	
11	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	3 jenis	202.737.700	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	3 jenis	149.810.400	

	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1000 Dokumen	100.650.000	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1000 Dokumen	149.810.400	
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan	102.087.700	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	0 Laporan	-	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kota Pasuruan	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	99,90 % 96,70 %	413.567.484	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kota Pasuruan	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	99,90 % 96,70 %	282.081.500	
12	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian yang diterbitkan	5300 akta	325.843.628	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian yang diterbitkan	5300 akta	227.818.280	

	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4600 Dokumen	108.444.358	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4600 Dokumen	36.888.380	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan	130.997.746	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan	104.528.600	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain BlangkoKTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	86.401.524	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain BlangkoKTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	86.401.300	
13	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Peserta Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	150 orang	87.723.856	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Peserta Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	150 orang	54.263.220	

	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	8 Laporan	62.302.790	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	8 Laporan	28.842.320	
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	6 Laporan	25.421.066	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	6 Laporan	25.420.900	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kota Pasuruan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	41 %	305.783.698	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kota Pasuruan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	41 %	152.840.897	
14	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah sistem database kependudukan berbasis SIAK yang terkelola	1 aplikasi	188.401.444	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah sistem database kependudukan berbasis SIAK yang terkelola	1 aplikasi	98.258.757	

	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	66 Dokumen	28.031.102	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	66 Dokumen	28.031.102	
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	160.370.342	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	70.227.655	
15	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah mitra yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	8 mitra	117.382.254	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah mitra yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	8 mitra	54.582.140	
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	117.282.254	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	54.582.140	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat (bottom up), perencanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil langsung dari atas (pemerintah) ke bawah (masyarakat) atau top down. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu berupaya memberikan kemudahan dalam pelayanan dan persyaratan pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Pasuruan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersinergi, diharapkan seluruh aspek Pemerintahan mulai dari skala Nasional, Provinsi hingga Kabupaten/Kota dapat saling mendukung rencana ataupun program rancangan prioritas dimulai dari rancangan prioritas nasional hingga kabupaten/kota. Berikut tema prioritas dan kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
4. Penguatan daya saing usaha.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
7. Percepatan pembangunan ibukota nusantara.
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

Arah kebijakan RKP Tahun 2024 dilaksanakan melalui proyek prioritas strategis (*major project*) :

1. Kawasan industri prioritas dan smelter.
2. Destinasi pariwisata prioritas.
3. Food estate (kawasan sentra produksi pangan).
4. Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.
5. Pengelolaan terpadu UMKM.
6. Wilayah adat Papua : wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.
7. Pembangunan ibukota nusantara.
8. Reformasi sistem perlindungan sosial.
9. Reformasi sistem kesehatan nasional.
10. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.

11. Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.
12. Jaringan pelabuhan utama terpadu.
13. Transformasi digital.
14. Akses air minum perpipaan (10 juta sambungan rumah)
15. Akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (90 persen rumah tangga).
16. Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.



Gambar 3.1. Tema Prioritas dan Kebijakan RKP Tahun 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan arah kebijakan RKP Tahun 2024 proyek prioritas strategis ke-13 yaitu "Transformasi Digital". Hal ini dikarenakan proyek prioritas strategis tersebut merupakan tanggung jawab semua aspek pemerintahan dalam mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan "nilai" yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.

Tematik dan prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2024 adalah "Aktivasi Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar, dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sosial", dengan arah kebijakan:

1. Penyediaan pasar penunjang sektor industri pengolahan dan perdagangan.
2. Perluasan promosi dan pasar industri olahan yang siap ekspor.

3. Pengembangan rantai manajemen distribusi logistik dan pasar yang mendukung perindustrian.
4. Intensifikasi pendapatan daerah melalui penguatan manajemen pengelolaan pajak dan retribusi.
5. Menjaga kondusifitas sosial dan politik.
6. Digitalisasi pelayanan publik mendukung aktivitas masyarakat.
7. Keberpihakan kesempatan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
8. Sarana dan prasarana sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan ke-6 yaitu “Digitalisasi Pelayanan Publik Mendukung Aktivitas Masyarakat”. Digitalisasi dalam pelayanan publik bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, melainkan juga bagi internal penyelenggara pelayanan publik. Digitalisasi dapat menghemat hingga 50 persen waktu pelayanan dan 50 persen anggaran yang dikeluarkan di kemudian hari. Digitalisasi layanan membuat efisiensi dalam bekerja hingga 60 persen. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memperbanyak pengembangan aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi digital dalam pemerintahan agar layanan publik makin meningkat.



Gambar 3.2. Tematik dan Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2024

Dalam mendukung arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan melakukan kerjasama dengan lembaga/perangkat daerah dalam pemanfaatan data kependudukan, integrasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan layanan instansi terkait, pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil digital, serta penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada warga.

Tabel 3.1.
Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional dan
Arah Kebijakan Daerah Tahun 2024

No	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kota Pasuruan	Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Transformasi Digital	Digitalisasi Pelayanan Publik Mendukung Aktivitas Masyarakat	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil serta inovasi berbasis teknologi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.2.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dari analisa kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi, prioritas tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah terwujudnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib.

3.2.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator *outcome* yang terukur. Dalam perumusan sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja sasaran yang akan diukur.

Adapun Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar.
2. Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar.

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			1 2022	2 2023	3 2024	4 2025	5 2026			1 2022	2 2023	3 2024	4 2025	5 2026
1	Terwujudnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	96,87	97,26	97,65	98,04	98,40	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	98	98,50	99	99,50	99,90
									Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	99,89	99,90	99,90	99,90	99,90
									Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	96,60	96,65	96,70	96,75	96,80
								Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	29%	35%	41%	47%	52%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Administrasi kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dalam pelayanan publik. Arah administrasi kependudukan antara lain untuk meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan, memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mendukung perumusan kebijakan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal yang mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, serta memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. Tujuan administrasi kependudukan juga digunakan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu, serta menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu setiap penduduk wajib melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan kepemilikan dokumen

kependudukan, penduduk dapat mengakses program dari pemerintah, seperti bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Kedudukan rencana kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, dalam rangka pencapaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan adalah menjadi acuan penentuan pilihan program kegiatan tahunan yang akan dirumuskan dalam perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang. Isi dan substansi dari rencana kerja mencakup indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang dirinci menurut fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, serta penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Rencana program kegiatan dan sub kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Berikut program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan dan sub kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 15 (lima belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 9. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

- Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
 - Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
10. Penataan Pendaftaran Penduduk
- Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
 - Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
11. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- Sub Kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
12. Pelayanan Pencatatan Sipil
- Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
 - Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan
13. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
 - Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil
14. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
- Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
15. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program kegiatan dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana yang merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 beserta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya tercantum sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Pasuruan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.729.984.100				7.035.697.525
2	12				6.729.984.100				7.035.697.525
2	12	01							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.729.984.100				7.035.697.525
2	12	01							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Kota Pasuruan	90 %	5.605.674.783	DAU		90 %	5.855.172.742
2	12	01	2.01						
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	90 %	105.347.500	DAU		90 %	110.614.875

2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	8 Dokumen	14.574.400	DAU		8 Dokumen	15.303.120
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pasuruan	2 Dokumen	10.052.400	DAU		2 Dokumen	10.555.020
2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Pasuruan	2 Dokumen	11.447.100	DAU		2 Dokumen	12.019.455
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	6 Laporan	11.544.500	DAU		6 Laporan	12.121.725
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	1 Laporan	57.729.100	DAU		1 Laporan	60.615.555
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	90 %	3.870.307.300	DAU		90 %	4.063.822.665

2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	25 Orang/bulan	3.821.484.100	DAU		25 Orang / bulan	4.012.558.305
	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	10 Laporan	48.823.200	DAU		10 Laporan	51.264.360
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	90 %	57.590.000	DAU		90 %	60.469.500
2	12	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	2 Laporan	57.590.000	DAU		2 Laporan	60.469.500
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	90 %	36.352.800	DAU		90 %	38.170.440
2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pasuruan	55 Paket	36.352.800	DAU		55 Paket	38.170.440

2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan	90 %	319.675.900	DAU		90 %	335.659.695
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	13 Paket	13.688.000	DAU		13 Paket	14.372.400
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pasuruan	2 Paket	21.837.400	DAU		2 Paket	22.929.270
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pasuruan	1 Dokumen	5.102.400	DAU		1 Dokumen	5.357.520
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	2 Laporan	9.228.100	DAU		2 Laporan	9.689.505
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	91 Laporan	269.820.000	DAU		91 Laporan	283.311.000
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Kota Pasuruan	90 %	192.574.566	DAU		90 %	202.203.294

2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pasuruan	25 Unit	192.574.566	DAU		25 Unit	202.203.294
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Kota Pasuruan	90 %	778.491.180	DAU		90 %	786.629.959
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	1 Laporan	2.200.000	DAU		1 Laporan	2.310.000
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pasuruan	3 Laporan	160.575.580	DAU		3 Laporan	168.604.359
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	4 Laporan	615.715.600	DAU		4 Laporan	615.715.600
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kota Pasuruan	90 %	245.335.537	DAU		90 %	257.602.314
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pasuruan	18 Unit	157.066.639	DAU		18 Unit	164.919.971
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan	37 Unit	49.781.802	DAU		37 Unit	52.270.892

2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	Kota Pasuruan	1 Unit	38.487.096	DAU		1 Unit	40.411.451
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber- KIA Persentase penduduk ber- KTP Elektronik	Kota Pasuruan	95 % 99 %	689.386.920	DAU		95 % 99 %	723.856.266
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terlayani	Kota Pasuruan	4 jenis	402.722.840	DAU		4 jenis	422.858.982
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	1000 Dokumen	81.118.240	DAU		1000 Dokumen	85.174.152
2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pasuruan	15000 Dokumen	28.823.000	DAU		15000 Dokumen	30.264.150
2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Pasuruan	12 Laporan	292.781.600	DAU		12 Laporan	307.420.680

2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penataan pendaftaran penduduk yang tersedia	Kota Pasuruan	3 jenis	136.853.680	DAU		3 jenis	143.696.364
2	12	02	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Kota Pasuruan	15000 Dokumen	25.524.580	DAU		15000 Dokumen	26.800.809
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kota Pasuruan	6 Dokumen	111.329.100	DAU		6 Dokumen	116.895.555
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	Kota Pasuruan	3 jenis	149.810.400	DAU		3 jenis	157.300.920

2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Pasuruan	1000 Dokumen	149.810.400	DAU		1000 Dokumen	157.300.920
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	Kota Pasuruan	99,90 % 96,70 %	282.081.500	DAU		99,90 % 96,70 %	296.185.575
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian yang diterbitkan	Kota Pasuruan	5300 akta	227.818.280	DAU		5300 akta	239.209.194
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Pasuruan	4600 Dokumen	36.888.380	DAU		4600 Dokumen	38.732.799
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kota Pasuruan	6 Layanan	104.528.600	DAU		6 Layanan	109.755.030

2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kota Pasuruan	1 Paket	86.401.300	DAU		1 Paket	90.721.365
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	150 orang	54.263.220	DAU		150 orang	56.976.381
2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	8 Laporan	28.842.320	DAU		8 Laporan	30.284.436
2	12	03	2.02	0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Kota Pasuruan	6 Laporan	25.420.900	DAU		6 Laporan	26.691.945
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	Kota Pasuruan	41 %	152.840.897	DAU		41 %	160.482.942

	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah sistem database kependudukan berbasis SIAK yang dikelola	Kota Pasuruan	1 aplikasi	98.258.757	DAU		1 aplikasi	103.171.695
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kota Pasuruan	66 Dokumen	28.031.102	DAU		66 Dokumen	29.432.657
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Pasuruan	4 Dokumen	70.227.655	DAU		4 Dokumen	73.739.038
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah mitra yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Kota Pasuruan	8 mitra	54.582.140	DAU		8 mitra	57.311.247
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pasuruan	2 Laporan	54.582.140	DAU		2 Laporan	57.311.247

BAB V P E N U T U P

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Program Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, akta pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan dan hasilnya digunakan untuk peningkatan pelayanan publik serta kegiatan pembangunan lainnya.

Data hasil proses administrasi kependudukan digunakan sebagai basis data dalam pelayanan dasar dan penyusunan kebijakan melalui strategi peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan. Data kependudukan yang terus mutakhir merupakan salah satu sumber utama statistik hayati yang dinamis dan akurat. Statistik hayati yang dinamis dan akurat merupakan sumber data utama untuk melakukan perumusan kebijakan serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.

Mengingat strategisnya data kependudukan dalam berbangsa dan bernegara terutama dari aspek kepastian status hukum warganya, untuk itu Rencana Kerja tahun 2024 ini perlu kajian dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus untuk mengakomodasi dinamika yang senantiasa berkembang di masyarakat.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, maka rencana kerja tahunan yang dibuat harus berorientasi pada

norma aturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas yang hasil akhirnya dapat diukur dengan jelas dan pasti.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) diupayakan agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas antar program, kegiatan serta sub kegiatan. Renja yang dibuat harus berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya yaitu RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kota, dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada untuk melaksanakan tugas pelayanan prima perlu ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan teknologi dan pelayanan kepada masyarakat, melalui bintek, pelatihan dan kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja pelayanan publik.

Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada saat ini masih kurang, untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merekrut Pegawai Harian Lepas (PHL) yang nantinya diharapkan dapat diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha melakukan inovasi pelayanan terus menerus yang mudah, cepat dan membahagiakan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam pelaksanaan program kegiatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan memiliki keterbatasan dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan yang sifatnya berkelanjutan dan jangka panjang, untuk itu diharapkan adanya tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam

Negeri dalam pembiayaan beberapa program kegiatan yang merupakan prioritas nasional, yang menunjang peningkatan program, kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Pasuruan.

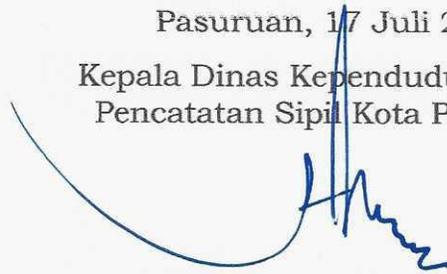
Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan atau tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan perangkat daerah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta meningkatkan kinerja perangkat daerah.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi serta meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Selanjutnya Rencana Kerja ini bertindak sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024.

Pasuruan, 17 Juli 2023

Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Pasuruan



SITI MARIYAM, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19670316 198903 2 012